

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Cirebon. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Cirebon dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Sumber, ... September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2 SUMBER DAYA PEMANGKAT DAERAH.....	11
2.2.1 Kondisi Kepegawaian.....	11
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	14
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
Tabel 2.3.1.....	15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	15
Tabel 2.3.2.....	17
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
Tabel 2.3.3.....	18
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SPIND.....	18
Tabel 2.3.4.....	19
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD.....	19
Tabel 2.3.5.....	16
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM.....	18
Tabel 2.3.6.....	17
DATA EXISTING HALTE, RANBU, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2017	
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB III.....	19
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	19
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH VU.....	40
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	42
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan.....	42
Tabel 3.3.1.....	43
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Peningkatannya.....	43
3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	43

1.5	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RUMH	44
1.5.1	Telaaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	44
	Tabel 1.5.1	44
	Permasalahan Pelayanan SMPD berdasarkan Telaaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	44
1.5.2	Telaaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
1.6	PERENTHAN ISU BU STRATEGIS	49
BAB IV		48
VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN		48
5.1	VISI DAN MISI	48
5.1.1	VISI	48
5.1.2	MISI	46
5.2	TUJUAN DAN SARAN JANGKA MENENGAH PERINGKAT DAERAH	48
	Tabel 5.2	46
	TUJUAN DAN SARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V		48
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		48
	Tabel 5.1	51
	Tujuan, Saranan, Strategi dan Arah Kebijakan	51
BAB VI		52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENJAJANGAN		52
	Tabel 6.1	53
	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024	53
BAB VII		70
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		70
	Tabel 7.1	73
	Indikator Kinerja SMPD yang Mengacu pada Tujuan dan Saranan RPMD	75
	Tabel 7.1	75
	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Saranan RPMD	75
BAB VIII		77
P E N U T U P		77
LAMPIRAN		78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Ranstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Ranstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focused Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Ranstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

Ranstra Dinas Perhubungan Cirebon Tahun 2019 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dan pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolan sarana perhubungan.

Ranstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 diharapkan menjadi jawaban konkret terhadap terdapatnya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan perbuatan nyata yang terencana secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rakayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Keuangan Daerah
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon (lembar daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 seri D.4);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4)
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E.3);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6)
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah merjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada

tahun 2019 – 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBUNGAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERDAMAIAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

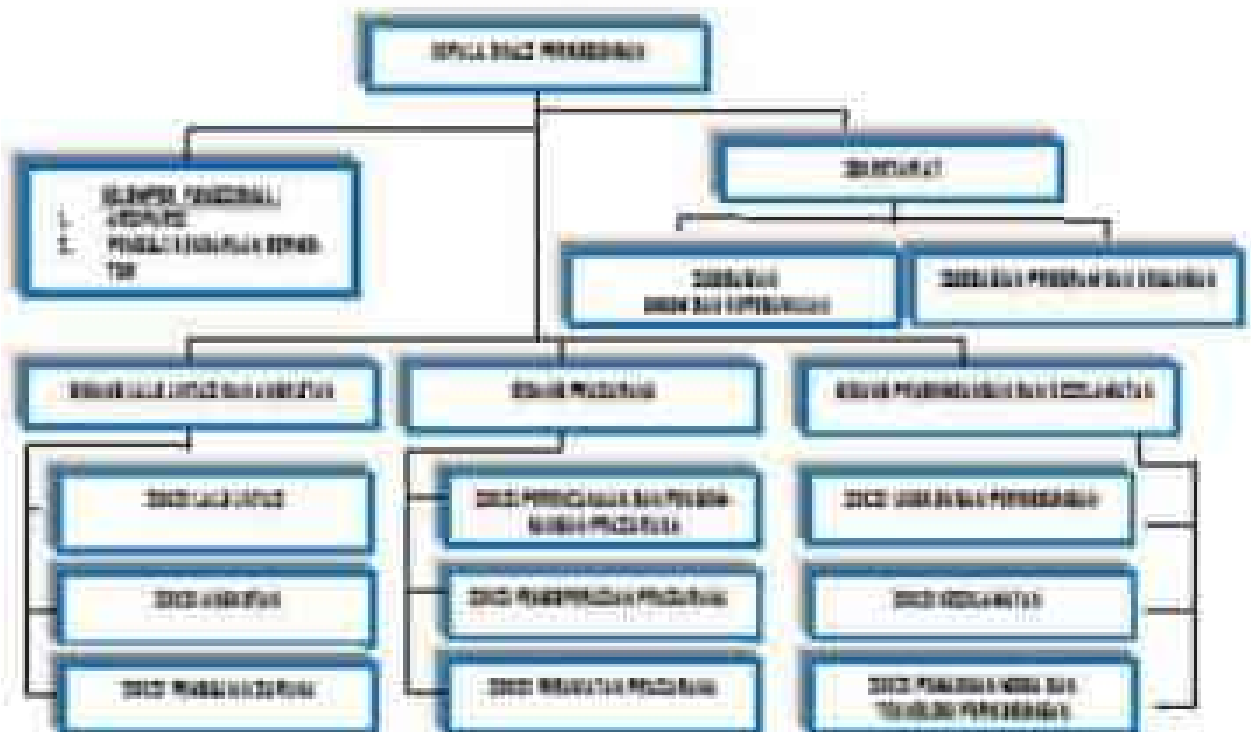
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 25, Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - g. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.1 SEKRETARIAT DINAS

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, memonitoring, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kemitraan;
 - f. pengendalian pengelolaan Administrasi kepegawaian;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penilaian organisasi dan tata laksana;
- k. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtinggalan dan administrasi kepegawaian.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen ke dinas;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta pengendalian.

- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kewartaan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyimpanan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengvekrasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Ranstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan paguangan kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;

- d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- f. persiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbandharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. persiapan bahanindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengavalasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pemohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;

- d. pelaksanaan pengalokasian angkutan darat, laut, sungai dan udara;
- e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengkajian lain penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Lalu Lintas

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemohonan analisis dampak lalu lintas serta penetapan lalu lintas perkotaan di kabupaten.
- 3) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas, 1. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
- l. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
- m. pengendalian dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Angkutan

- 1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- i. pemberian izin pengadaan atau pembangunan parkiran khusus dan izin operasi;
- j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaraknya dalam daerah kabupaten;
- k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. pengurusan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
- m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
- n. pengelakan retribusi tarif angkutan;
- o. pengavalasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang dibenarkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Seksi Pengujian Sarana

- 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;

- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
- i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan pertakan kapal;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3 BIDANG PRASARANA

- 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaksanakan pertubangan.
- 3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
 - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
 - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan prasarana;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana pembangunan.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan baru jalan;
 - d. pelaksanaan pemberian (zintekomendasi) untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki (zintekomendasi);
 - f. pelaksanaan investigasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
 - g. penyajian bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
 - h. penyajian rancangan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penempatan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - i. pelaksanaan penempatan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;

- k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
- m. pengavalasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengoperasian prasarana melalui pengelolaan perkeruan dan terminal.
- 3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
 - c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah;
 - g. pengavalasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Seksi Perawatan Prasarana

- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan pertenghalan jalan.
- 3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
 - b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
 - c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan pendukung di jalan kabupaten;
 - e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- 2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- 3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. pemberian dan penyempaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. pengavalasian dan pelaporan, pelaksanaan, kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diras yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1 Seksi Lingkungan Perhubungan

- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
 - c. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;

- d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
- e. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
- f. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- i. pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- j. pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;
- k. pelaksanaan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
- l. pelaksanaan dan/atau mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Keselamatan

- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
- b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
- c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
- d. pengawasan laik fungsi jalan;
- e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
- f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- g. fasilitasi promosi dan kerjasama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitas keselamatan kendaraan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat penzinaan kendaraan umum baik kendaraan berang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
- l. pelaksanaan penilang terhadap pelanggaran pelanggaran lalu lintas dengan mengeluarkan baret acara penilang;
- m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
- o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan perhubungan, mengendalikan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- 3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengujian di bidang perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
 - f. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menurut golongan ruang / kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Januari Tahun 2019 terdiri sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PANGKAT
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						1
Sekretaris Dinas	1					1
Subbidg. Umum dan Kepegawaian		2	2		9	13
Subbidg. Program dan Keuangan	1	6	3		5	15
Bidang Angkutan	1					1
Seksis Terminal dan Parkir		2	6		17	25
Seksis Angkutan Darat		1			2	3
Seksis Angkutan Laut, Sungai dan Udara		1			2	3
Bidang Lalu Lintas	1					1
Seksis Perencanaan, Penetapan dan Pelaksanaan Jalan		2			2	4
Seksis Peningkatan Jalan Umum		7	4		9	20
Seksis Analisa Campak Lalu Lintas		2			3	5
Bidang Keselamatan	1					1
Seksis Pengujian Kendaraan Bermotor		3	4		8	15
Seksis Inspeksi Keselamatan		1	1		1	3
Seksis Kelembagaan Lalu Lintas		6	2		8	16
Fungsional Penguji		4	4			8
Jumlah	6	38	25		85	135

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan disediakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya berikut sebagaimana terdapat tabel 2.2

Tabel 2.2.
DATA PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S.2	S.1	D1/D2 D3	SMA/ Setara	SMK	SD	
Kepala Dinas	1						1
Sekretariat							1
Sekretaris Dinas	1						1
Subbidg. Umum dan Kepegawaian			1	2			4
Subbidg. Program dan Keuangan	1	5	1	3			10
Bidang Angkutan		1					1
Seksis Terminal dan Parkir		3		5			8

Sekolah Angkutan Darat		1					1
Sekolah Angkutan Laut, Sungai dan Udara		1		1			1
Bidang Lalu Lintas		1					1
Sekolah Perencanaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan		2					2
Sekolah Peningkatan Jalan-Utama		7		4			11
Sekolah Analisa Dampak Lalu Lintas		2					2
Bidang Keselamatan	1						1
Sekolah Pengujian Kendaraan Bermotor		3		4			11
Sekolah Inspeksi Keselamatan	1			1			2
Sekolah Kelembutan Lalu Lintas		5		3			8
Fungsional Penguji		2	2				4
Jumlah	5	33	5	27			69

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila berdasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2019 formasi yang ada sebanyak 68 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan kelugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan kelugasan kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan per 29 Juni 2019 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Tenaga Honorar/ Non PNS pada Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Kelugasan	Jumlah
1	Sekretariat	Pengadministrasian Umum	3
		Operator Komputer	2
		Supir	1
		Praktisi Jantar	1
		Pengelola Arsip	3
2	Bidang Angkutan	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	4
		Pemungkut Rekrutasi	12
3	Bidang Lalu Lintas	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	1
		Pembinaan Umum	1
		Teknis PJJ	11
4	Bidang Keselamatan	Operator Komputer	1
		Pengelola Arsip	2
		Pembinaan Umum	2

		Analisis Data Tolak Penerimaan	1
		Teknis Pengaturan Laku Lintas	11
		Teknis Migrasi	8
Jumlah			65

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 – 2024

Nama Barang	2016			2017			2018			2019			2020		
	Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
		HR	Baik		Rusak	HR		Baik	Rusak		HR	Baik		Rusak	HR
gedung Kantor	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	5	-	
Batu Paving	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	
Taman	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
Meubelair roda 4	12	-	-	12	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	
Meubelair roda 2	28	-	-	28	-	-	28	-	-	28	-	-	28	-	
Kursi	12	-	-	14	-	-	21	-	-	26	-	-	26	-	
Laptop	4	-	-	7	-	-	7	-	-	10	-	-	13	-	
Printer	29	-	-	28	-	-	40	-	-	51	-	-	61	-	
LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meubel Roda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
HT	6	-	-	6	-	-	6	-	-	8	-	-	10	-	
Meubel Roda	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
AC	19	-	-	14	-	-	17	-	-	28	-	-	36	-	
alat PHS	6	-	-	10	-	-	10	-	-	20	-	-	20	2	
Peralatan Kabin-kabin (APK)	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	
GPS	1	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	
Downing Teller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akumulat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator Kinerja	Program/Raport	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi Dinas Berkeadilan	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan										
		Penyediaan Jasa Pemrosesan dan/atau Penghapusan Dokumen	12 bulan, 4 orang	12 bulan, 4 orang	5-bulan dan 1 org	5-bulan dan 1 org	4-bulan dan 1 org	4-bulan dan 1 org	12 bulan	12 bulan	4 org	4 org
		Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	40 Rendaman	40 Rendaman	1 org, 3 org	1 org, 3 org	1 org, 15 org	1 org, 15 org	11 org	11 org	10 org	10 org
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan dan/atau Jasa	41 org, 12 Bulan	41 org, 12 Bulan	5 org	5 org	22 org	22 org	75 org	75 org	72 org	72 org
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 org, 27 org, dan 1200 material	1 org, 27 org, dan 1200 material	20 org	20 org	60 org	60 org	48 org	48 org	48 org	48 org
		Penyediaan Jasa Telepon	1 org, 13 org	1 org, 13 org	20 org	20 org	60 org, 2.345 Material	60 org, 2.345 Material	60 org	60 org	12 org	12 org
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	7 org	7 org	1 org, 14 org	1 org, 14 org	4 org, 13 org	4 org, 13 org	34 org	34 org	34 org	34 org
		Penyediaan barang di kawasan/Perumahan	1 org, 16 org	1 org, 16 org	7 org	7 org	7 org	7 org	140 org	140 org	7 org (100 org)	7 org (100 org)
		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan kendaraan	3 org	3 org	5 org	5 org	3 Surat Ke- sah, 2 org 1 org	3 Surat Ke- sah, 2 org 1 org	5 org 10 org	5 org 10 org	100, 10, 10	100, 10, 10
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.070 org	1.070 org	800 Org	800 Org	800 Org	800 Org	800	800	1.000	1.000
		Keuntungan/pendapatan dimusnahkan ke luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun org	1 tahun org	1.000.000 org	1 tahun org	12 bulan	12 bulan	100 org	100 org
		Program Peningkatan Sistem dan Peningkatan Aparatur										
		Melaksanakan pengujian Sistem dan/atau Perangkat Lunak	1 kali inspeksi DAS/PTNL, 1 kali test	1 kali inspeksi DAS/PATNL, 1 kali test	1 kali inspeksi Perwakilan 1	1 kali inspeksi Perwakilan 1	1 kali inspeksi uji keefektifan, 1 kali inspeksi	1 kali inspeksi uji keefektifan, 1 kali inspeksi	-	-	1 kali	1 kali

		Operasional	Operasional 20- OPB, 1 ruangan dewasapada Kelas 2 km Jarak 20x10	Operasional 20- OPB, 1 ruangan dewasapada Kelas 2 km Jarak 20x10	Unit baru 2	Unit 2	Unit 20-ruangan	Unit 10-ruangan				
		Melaksanakan Pemeliharaan Bahan/Bahan, Saling ber- sih	1 pemeliharaan saling antar	1 pemeliharaan saling antar	4 pemeliharaan 1 log kebumah- tan	4 pemeliharaan 1 log kebumah- tan	1 gelang kumbar	1 gelang kumbar	10 peti	10 peti	1 gelang	1 gelang
		Melaksanakan Pemeliharaan Bahan/Bahan, Saling ber- sih	24 km	24 km	24 km	24 km	22 km	22 km	27 km	27 km	21 km	21 km
		Melaksanakan Pemeliharaan Saling/Bahan, Saling ber- sih	-	-	2 log, Pem- lahan gelang kumbar 20x10	2 log, Pem- lahan gelang kumbar 20x10	-	-	1 gelang	1 gelang	1 gelang	1 gelang
		Program Peningkatan Kualitas Air										
		Melaksanakan Pengerjaan pembangunan pem- berdayaan unit pesisir	1 log, 1 km	1 log, 1 km	1 log, 2 peti	1 log, 5 km	2 km	2 km	200 Pagar	200 Pagar	170 Pagar	170 Pagar
		Program Peningkatan Pengerjaan Sistem Pemukiman Kawasan Rimba Sempadan										
		Melaksanakan Pemukiman di kawasan kawasan kawasan Energy dan Sempadan Energy Sempadan	-	-	1 km	2 km	24 km	24 km	8 km	8 km	8 km	8 km
		Melaksanakan Pemukiman lagi di kawasan kawasan Sempadan	2 km	2 km	2 km	2 km	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km
		Melaksanakan Pemukiman di kawasan kawasan kawasan Sempadan	5 km	5 km	4 km	4 km	6 km	6 km	1 km	1 km	1 km	1 km
		Program Pengerjaan Sistem Pemukiman Sempadan										
		Pengerjaan Sistem Pemukiman Sempadan	2 km/1 km	2 km/1 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km
2	Saling Saling Pemukiman dan Pemukiman	Program Pengerjaan Pemukiman dan Pemukiman										
		Melaksanakan Pemukiman di kawasan kawasan, Sempadan, dan di kawasan kawasan Sempadan	1 log, 1 km	1 log, 1 km	-	-	-	-	-	-	1 km	1 km
		Melaksanakan log di kawasan kawasan pem- berdayaan pemukiman dan kawasan pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	1 km	1 km	1 km

		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
		Monev/evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	32 Kegiatan Dokumentasi Kegiatan di tingkat pemerintah provinsi sebagai bentuk dan bentuk kegiatan	10 kegiatan kegiatan di tingkat	10 kegiatan kegiatan di tingkat	0 kegiatan	10 kegiatan	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000
8	Program pemberdayaan anggota yang memiliki peran strategis dan lain-lain	Program Pemberdayaan dan Pemertahanan Prinsipal dan Terampil LAM										

		Membaca literatur keahliannya/penelitian-jurnal dan prosiding keahliannya/buku (jurnal)	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	20 skripsi	20 skripsi	10 skripsi	10 skripsi
		Membaca literatur keahliannya/penelitian-jurnal dan prosiding keahliannya/buku (jurnal)	Penelitian 1 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 1 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	1 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	1 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	Penelitian 9 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas			10 skripsi	10 skripsi
4	Meningkatkan jumlah kegiatan sosial dan keagamaan	Program Pengabdian Masyarakat										
		Membaca literatur keahliannya/penelitian-jurnal dan prosiding keahliannya/buku (jurnal)									10 skripsi	10 skripsi
		Membaca literatur keahliannya/penelitian-jurnal dan prosiding keahliannya/buku (jurnal)							20 skripsi dan 10 skripsi	20 skripsi dan 10 skripsi	10 skripsi dan 10 skripsi	10 skripsi dan 10 skripsi
		Membaca literatur keahliannya/penelitian-jurnal dan prosiding keahliannya/buku (jurnal)	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	2 skripsi dan 1 skripsi hasil uji tuntas	10 skripsi	10 skripsi	10 skripsi	10 skripsi

					100 Candradia, 100 Hari PADA anak sekolah dari 1 org atau ke kelompok	100 Hari PADI anak sekolah dari 1 org kepada teman satu						
		Membuatkan Capres pendapat sendiri tentang perubahan lingkungan sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 buku	1 buku
		Membuatkan dokumen Pergaulan dan Analisis Situasi Sekolah (aspek Anggaran, Organisasi, Kelemba- ran, Sosial dan lain-lain)	1 buku dan 2 kegiatan	1 buku dan 2 kegiatan	1 buku dan 2 kegiatan	1 buku dan 2 kegiatan	10 Buku	10 Buku	1 buku dan 2 kegiatan	1 buku dan 2 kegiatan	1 org	1 org
		Membuatkan laporan Pembelajaran dan Pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
		Membuatkan buku sifat personalitas karakter sifat siswa dan sekolah	-	-	1 org	1 org	4 buku	4 buku	100 Pustaka aplikasi dan sifat pribadi	100 Pustaka aplikasi dan sifat pribadi	1 org	1 org
		Membuatkan laporan Membangun, Berprestasi dan Berprestasi	-	-	-	-	75 Laporan trampil, 3 poin kegiatan sifat	75 Laporan trampil, 3 poin kegiatan sifat	-	-	1 org	1 org
		Membuatkan laporan Pembelajaran dan Pembelajaran Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org	1 org PADI	1 org PADI
		Membuatkan Pembinaan Karakter, Berprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku/jenis sifat	100 buku/jenis sifat
		Membuatkan laporan Karakter, Berprestasi, Karakter dan Berprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
		Membuatkan laporan Pembelajaran dan Pembelajaran Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
8	Meningkatkan prestasi dan kinerja Pembelajaran PADI	Program Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran										
		Membuatkan PADI sifat (sifat, sifat, sifat) sifat (sifat, sifat, sifat)	4 buku dan	4 buku dan	-	-	PADI sifat (sifat, sifat, sifat)	PADI sifat (sifat, sifat, sifat)	1 buku	1 buku	4 buku	4 buku
8	Meningkatkan prestasi dan kinerja Pembelajaran	Program Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran										

		Medikamenten-Prüfung Anatomische Lehrtafel	1 Tag, 20% 120 min Klassenarbeit 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min Klassenarbeit 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	Prüfung schriftlich 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	Prüfung schriftlich 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag	1 Tag	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 Punkte	100 Punkte
		Medikamenten-Prüfung Merkmal	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag	1 Tag	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 Punkte	100 Punkte
		Medikamenten-Prüfung Pflanz-Prüfung	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag, 20% 120 min 100 Punkte 1. Teil: 60 min 2. Teil: 60 min	1 Tag	1 Tag	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 min, 1 schriftlich, 10 Punkte	100 Punkte	100 Punkte

		Mendapatkan Penghasilan dari Penjualan Pak- sangan Jalan (PJ) (Rak)			307 Rak ditrus, dan 20 PJ Berkas dengan sisa 1 pa- ket, tidak ada dan sisa PJ / 5 orang	307 Rak di- rus, ditrus, PJ/ berkas dengan sisa 1 paket, tidak ada dan tidak PJ / 5 orang	1117 buah	1117 buah	1.000 Pak- sangan	1.000 Pak- sangan	1.000 Pak- sangan	1.000 Pak- sangan
Program Pertigkatan Kinerja Pengendalian Kualitas Berbasis												
		Pelaksanaan (2) Parkir tem- bakas Berbasis (2000) saling dan 4 kor revisi kendaraan	10.000.000 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000 10.000.000	100.000	17.000	100.000		20.000.000.000	20.000.000.000	100%	100%

Tabel 2.3.2

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	Uraian	Jumlah														
		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai
1	2	3			4			5			6			7		
1	Materiial target kebutuhan pembuatan Lahu lidas Kebupaten Cirebon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya jumlah angkutan pedesaan yang mematuhi dan selamat ber- dasarkan regulasi - transk yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	20%	10%	100%
4	Tersedianya angkutan Darat dan Laut	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	10%	100%	100%
5	Mengaktifkan semua Angkutan yang memenuhi syarat Tolers lalu jalan	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	10%	111%	100%
6	Akumulasi Terpasangnya kebutuhan Ideal Penerangan Jalan Umum	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	10%	20%	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Tabel 2.3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

NO	Uraian	Luapan														
		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
2		3			4			5			6			7		
1.	Meningkatkan Pelayanan dan sarana Transportasi Publik															
	1.1 Program Penyalangan Sarana dan Prasarana Perhubungan															
	1.1.1 Melaksanakan pembangunan halte bus, Tugu gerbang terminal	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan															
	2.1 Program Pengendalian dan Penguasaan Lalu Lintas															
	2.1.1 Melaksanakan Pengedahan Rambu-rambu Lalu Lintas	120	750		101	111		117	117		100	100		100	100	

2.1.3 Melaksanakan Pengadaan Merkajasin		1.456			1.000			25.000			1.500			1.477
2.1.3 Melaksanakan Pengadaan Pegawai lain		507			100			87			100			504
2.1.4 Melaksanakan Pengadaan Jas Pemasangan Jalan Umum (PJU)	500	8.300		807	807		1.117	1.117		1.000	1.000		1.000	1.954
2.2 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Emisi Gas Beracun														
2.2.1 Pelaksanaan Uji Perek Kondisi Beracun	100 00	25.300		10.000	25.300		10.000	25.300		10.000	17.643		10.000	28.400

Berdasarkan tabel 2.7, di atas Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan dengan target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama dapat di jelaskan sebagai berikut

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah.

Pencapaian pelayanan pada bidang perhubungan ada meliputi 6 (Enam), indikator kinerja, dari table 2.7 tersebut diketahui bahwa pencapaian beberapa target masih di bawah target RPJMD meskipun secara umum tidak memenuhi target Renstra 2014-2019.

Adapun indikator yang masih di bawah target RPJMD adalah:

- a. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut;
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi Publik;

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum IKU/IKK dalam indikator pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 2.8 di atas diketahui bahwa pencapaian indikator pelayanan belum bisa menggambarkan keberhasilan indikator selama tahun 2014-2017 karena tidak didukung data yang valid, sedangkan hasil evaluasi pencapaian IKU/IKK baru tahun 2018 diketahui terlihat kecenderungan naik sebesar 100%.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 5 (lima) tahun 2014-2019 telah dilaksanakan perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan. Selanjutnya dari hasil capaian indikator kinerja RPJMD ada beberapa program dan kegiatan diketahui capaian sebagai berikut

1. Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik.

- 1.1 Capaian peningkatan prasarana dan sarana transportasi publik yang telah dilaksanakan sesuai program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan melaksanakan pembangunan Halte bus,Taxi gedung terminal dihalal sebagai berikut.

Tabel 2.3.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD

Kategori	ANGGARAN TAHUN					Realisasi Anggaran per Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pemerintah Kota Cirebon	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95

Tabel 2.3.5
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM

Bidang	Anggaran 2016 Tahun				Realisasi Anggaran 2016 Tahun				Realisasi Anggaran dan Pengerjaan Tahun				Rasio 2016	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2016	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2.000.000.000,00														
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,22	0,27	0,50	6,5	3,14
Program Peningkatan Kualitas dan Promosi Agribisnis	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	10,25	10,25
Program Peningkatan Kualitas Produk	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,37	0,38	0,38	0,38	10,00	2,01
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani/pekebun dan ternak	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,33	0,33	0,33	1,1	-0,69
Program Peningkatan akses permodalan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	1,00	0,90	1,00	0,20	-10,23
Program Peningkatan produktivitas ternak perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,31	0,30	0,30	10,17	-10,11
Program Peningkatan Keterampilan Peternak Perikanan dan Perikanan LLAJ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,31	0,30	0,30	1,49	-10,26
Program Peningkatan Pelayanan Agribisnis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,29	0,30	0,30	10,10	-11,40
Program Peningkatan Kualitas Produk Perikanan									-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan akses permodalan		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,37	0,36	0,36	14,10	12,12
Program Peningkatan akses permodalan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,37	0,36	0,36	0,37	10,22	10,22
Program Peningkatan akses permodalan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,29	0,30	0,30	-10,10	-10,11

Tabel 2.3.6

DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAJ PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN

No	Jenis	Status	DATA AWAL 2014	2015		2016		2017		2018		2019		REKORD		PERSYARAFAN
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Halte	Lot	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25	11	43%
2	Rambu Lalu Lintas	Lot	76	122	123	207	213	216	201	215	171	168	39	1.122	1.274	91%
3	Marka Jalan	Lot	5.400	4.000	7.700	26.000	23.000	26.000	2.000	26.000	277	27.000	2.200	100.400	28.520	28%
4	Pagar Pengaman Jalan	Lot	807	900	270	400	37	410	100	420	170	440	189	2.017	1.433	71%
5	Puji	500 Cahaya	1.121	207	207	1.112	1.717	2.000	1.000	2.000	1.300	2.000	1.700	10.016	10.217	98%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam periode lima tahun ke depan Kabupaten Cirebon akan mengalami perkembangan transportasi yang sangat signifikan dengan dilihat dari dibangunnya Jalan TOL (CIPALI) dan beroperasinya Bandara *Internasional Kertsaji Majalengka*. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses perjalanan dari antar provinsi dan ke Bandara, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk membarikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi diantaranya:

1. Pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan rencana induk transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Jaringan angkutan publik yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Pembangunan ATCS (*Area Traffic Control System*).
5. Kasadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya:

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya;
- 2) Semakin kurangnya angkutan umum yang tidak berkebang akibat adanya angkutan *online (Mobil Angkutan dan Motor)*;
- 3) Ketersediaan fasilitas perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota;
- 4) Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Strategis Kabupaten Cirebon melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung terdapatnya keseimbangan pembangunan wilayah.
- 2) Ketersediaan moda transportasi angkutan umum public belum sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Cirebon mempunyai keunggulan kompetitif wilayah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Kota Cirebon, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Cirebon berada di jalur lalu lintas di pulau Jawa bagian utara, diantara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang sangat strategis dimana menjadi lintasan antara ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah lain sehingga menjadi daerah penghubung ekonomi dan pemerintahan sehingga menjadi daya tarik ekonomi dan investasi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya data base angkutan, data base angkutan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, data base analisis kebutuhan prasarana lalu lintas, data base kondisi kendaraan angkutan publik lak jalan, data base lalu lintas harian rata-rata, data base kondisi existing lalu lintas dan angkutan jalan, data base sarana prasarana pelayanan publik terminal, halte dan prasarana angkutan jalan lainnya, serta data base kebutuhan sarana operasional bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya penanganan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana persimpangan lalu lintas dan jalan serta perlintasan sadidang.
4. Belum optimalnya ketersediaan prasarana fasilitas lalu lintas dan jalan sesuai kebutuhan lalu lintas dan jalan.
5. Belum tercapainya jangkauan angkutan public yang terkoneksi dengan mode transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.

6. Belum adanya ATCS (Area Traffic Control Sistem) sebagai salah satu navigasi pengendalian lalu lintas melalui Smart City .
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas ada angkutan jalan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
8. Masih minim dan terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan.
9. Belum optimalnya pengelola parkir.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman"

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju yang tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang santiafasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beradab;
4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung tercapainya stabilitas nasional;

Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi-4 yaitu:

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapaasitas aparatur pemerintah daerah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Tenwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman			
Misi	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pemaksimalan Pelayanan SKPD	Penghambat	Faktor Pendorong	
1.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah			
a.	Program pengembangan dan pengamanasan jalan lintas	Belain-adaanya pemetaan perhubungan jalan kabupaten/jalan, pengamanasan jalan dan P2U.	Daupinggi ketertarikan pembangunan jalan karena meningkatkan prestasi kerja di Kabupaten Cirebon	Resolusi memenuhi tujuan Pembangunan
b.	Agenda Peningkatan kualitas pengurusan kendaraan bermotor	Mewarung kewenangan dan lintas	Daupinggi mengontrol yang telah beres-beres atau beres-beres	Melaksanakan kewajiban sesuai perencanaan kewenangan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Sehubungan dengan tersebut Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini akan berakhir maka sebagai acuan berikutnya dalam perencanaan pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai kesambangant dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyalurkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya bertalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan pedesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi

angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pengsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (*fresh good and high value*); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Belum maksimalnya, perlengkapan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di sebagian wilayah Timur	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Kerjasama antara Pemda, Dishub Provinsi dan Kementerian Perhubungan

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 telah ditetapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya penanganannya sebagaimana Tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Belum dilakukannya kajian jaringan prasarana	Banyaknya jaringan jalan prasarana yang berjalan sendiri-sendiri	Komitmen yang kuat antara SKPD terkait
2.	Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (B) huruf papengoptimalan terminal penumpang tipe C, di Kec.Lemahabang dan Ajawinangun	Belum adanya pembangunan terminal bagi penumpang angkutan umum.	Usulan pembangunan terminal penumpang umum.	Koordinasi dengan stakeholder terkait
3.	Jaringan trayek angkutan	Kurangnya	Belum	Jaringan

	penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi a ; d. penggambaran trayek angkutan pedesaan di wilayah yang belum terlayani	kendaraan angkutan penumpang masyarakat	Terintegrasi ya Jaringan Trayek dan Kurang Nyaman nya Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Cirebon	Trayek angkutan penumpang yang terintegrasi
--	---	---	--	---

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memfasilitasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis membandingkan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat lebih "jauh" dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
4. Memperbandingkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
5. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimana datang dengan memperibandingkan isu-isu dan dinamika situasi saat ini. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI DAN MISI

5.1.1 VISI

Visi Bupati Cirebon pada tahun 2019 – 2024 adalah:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMA, MAJU DAN AMAN".**

5.1.2 MISI

Misi Bupati Cirebon adalah:

" Meningkatkan Produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing dipasar Internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Daerah".

5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan".

Pengukuran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana teruang dalam Tabel 4.1

**Tabel 5.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Trenbul 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Service Transportasi yang Berkeadilan- merata		Meningkatnya ang- ka kecukupan	213 Kecukupan	209	205	200	196	191

	Meningkatnya ke-lancaran dan Kenda-rataan Ber-lalu Lintas	Netto volume per kapitan (VC/Ram)	8,76 VC	8,76	8,73	8,72	8,78	8,69
	Meningkatnya Kandang yang Berkesel-maan	Pemertaa-jumlah Kan-dangan laikfungs per Total jumlah kandang waji-lu	82,77 Pemas	82,69	83,96	83,28	83,44	83,67
	Meningkatnya pe-layanan prekursor yang me-madai	Meningkatnya kinerja dan pe-layanan ditan-pributan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu tujuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pertubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan percobaan dan *Focused Group Discussion* untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebagai berikut.

1. Kekuatan (Strength).

- Luas wilayah kabupaten Cirebon, sesuai 107,028 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2.283.387 jiwa.
- Letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada di lintasan strategis sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur jalan nasional (pantura).
- Berada di dataran rendah wilayah pantajut Jawa dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 0-350 m di atas permukaan laut.
- Wilayah produktif, perindustrian, perdagangan, dan usaha lainnya.
- Potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang handal.
- Ketersediaan sarana transportasi yang memadai dan multi moda transportasi angkutan jalan, moda kereta api, moda transportasi laut dan moda transportasi udara.

2. Kelemahan (Weakness)

- Kepadatan jumlah penduduk yang tidak merata, terfokus di beberapa wilayah kecamatan terutama wilayah ibu kota kabupaten.
- Persataan ruang wilayah yang belum terkonsep (tidak memiliki masterplan pengembangan wilayah sesuai dengan tuntutan zaman).

- Masih rendahnya indeks pembangunan masyarakat (IPM), serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
- Kompetensi aparatur pemerintahan belum memadai secara kuantitatif dan kualitatif sehingga masih terdapat ketidak seimbangan dan jumlah kebutuhan dan ketidakan sesuai pendidikannya.
- Sarana dan prasarana public yang menjadi kebutuhan masyarakat belum tercapainya terutama jaringan yang belum baik, kelangkaan kendaraan belum tercapainya, fasilitas sarana lalu lintas.
- Ketersedianya jaringan moda transportasi penghubung antara wilayah belum memadai.

3. Peluang (Opportunity).

- Masuknya Kabupaten Cirebon di RPJM Nasional dalam wilayah pengembangan pusat pertumbuhan Jawa Barat daerah rencana pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 2018
- Meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon.
- Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikelola dan dipasarkan.
- Dapat memberikan dampak positif terkait penerapan tenaga kerja local sehingga meminimalkan pengangguran.
- Meningkatnya ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
- Terwujudnya peluang usaha di berbagai sektor.
- Wilayah Kabupaten Cirebon sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan, sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dengan masukan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- Teroptimalnya kompetensi aparatur makrekal yang berwawasan luas.
- Terbentuknya transportasi masa baru yang dapat menghubungkan seluruh akses potensial.

4. Ancaman/Tantangan (Threat)

- Kepadatan penduduk semakin bertambah, seiring munculnya masyarakat urbanisasi.
- Terjadinya dampak negative dari berbagai hal baik kerusakan lingkungan, kesemrawatan lalu lintas dan kemacetan, perubahan iklim, maupun masuknya budaya barat yang mempengaruhi kultur budaya local sehingga menghilangkan sense of belong (rasa peduli terhadap sesama)
- Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Meningkatnya tindak pidana kejahatan, kekerasan dan perbuatan kejiwaan
- Naiknya harga kebutuhan masyarakat, baik yang pokok maupun sekunder
- Naik angkutan kecelakaan lalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Bupati Cirebon Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan sarana prasarana dan rekayasa lalu lintas;
2. Terpenuhiya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laki Jalan dan Pengendara yang paham berlalu lintas;
4. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Ranstra. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berlalu Lintas;
4. Peningkatan Fasilitas Perkarotaan;
5. Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan;
6. Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum;
7. Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
8. Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berlalu Lintas;
10. Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang;
11. Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi;
12. Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Amin,						
MISI KE 4 : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intrnasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparaturn pemerintah daerah						
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan			
Meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan			Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen dan Behavior Lalu Lintas			
			Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen dan Behavior Lalu Lintas			
			Peningkatan Peningkatan Kebutuhan Fasilitas Berjalan Lintas			
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian			
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan			
			Peningkatan Fasilitas Persewaan Jalan Umum			
			Terpenuhiya Angkutan Umum yang berkeselamatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat			
			Peningkatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum			
			Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan			Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berjalan Lintas
						Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berjalan lintas			
			Peningkatan pengawasan angkutan yang dan barang			
			Peningkatan Kapasitas Pengemudi, Jarak, Kendaraan dan Mutu/kecepatan Transportasi			
			Meningkatkan Pelayanan Berkamiran yang memadai			
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan			
			Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan			

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2019) sampai dengan Tahun Kelima (2024), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, keefektifannya program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table 6.1

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024

ENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERMUKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DAERAH KABUPATEN
PERUMPAHAN KABUPATEN CIBINONG

Tipe	Kecamatan	Kode	Kategori Kegiatan	Materi Pokok (Garis Besar Rencana Strategis dan Rencana Kerja)	Luas Muka	Tipe dan Waktu Pelaksanaan												Sumber Pendanaan Anggaran 2019	Kategori	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Anggaran Dasar Kabupaten Cibinong						20	100	100.000.000,00	200	1.000.000.000,00	300	1.500.000.000,00	400	2.000.000.000,00	500	2.500.000.000,00	600	3.000.000.000,00		
Anggaran Pendapatan dan Pajak Daerah						175	875	2.225.000.000,00	875	3.500.000.000,00	1.175	4.675.000.000,00	1.475	5.850.000.000,00	1.775	7.025.000.000,00	2.075	8.200.000.000,00		
		01	Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mengingat tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cibinong yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah	20 Muka	10	1.000.000,00	20	2.000.000,00	30	3.000.000,00	40	4.000.000,00	50	5.000.000,00	60	6.000.000,00			
				Membina dan mengembangkan aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong yang profesional, jujur, dan berprestasi	20 Muka	10	1.000.000,00	20	2.000.000,00	30	3.000.000,00	40	4.000.000,00	50	5.000.000,00	60	6.000.000,00			
				Membina dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Cibinong	20 Muka	10	1.000.000,00	20	2.000.000,00	30	3.000.000,00	40	4.000.000,00	50	5.000.000,00	60	6.000.000,00			
		02	Manajemen Daerah dan Anggaran Pendapatan/Pajak	Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
				Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
				Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
		03	Manajemen Program dan Anggaran Pendapatan/Pajak	Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
				Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
		04	Manajemen Program dan Anggaran Pendapatan/Pajak	Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
				Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
		05	Manajemen Program dan Anggaran Pendapatan/Pajak	Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
				Membina dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan Kabupaten Cibinong	5 Muka	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			

Year	Month	Date	Project description	Activity description (see figure 1)	Budget	Major Financial Grouping Division												Other financial data	Total
						2001		2002		2003		2004		2005		2006			
						Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
		02/29/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		03/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		04/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		05/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		06/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		07/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		08/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
		09/27/01	Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total
			Project description	Activity description	Budget	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Other	Total

Titel	Basis	Kategorie	Projektbeschreibung	Ziele des Projekts (nach dem Abschluss)	Projektzeitraum	Projektbudget (in €)												Gesamtwert	Status
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
				Projektname: ...	1	1													
		11.1.1	1	1													
		11.1.2	1														
		11.1.3	1	1													
...					1	1													
		11.1.4	1	1													
		11.1.5	1														
		11.1.6	1	1													
		11.1.7	1														
		11.1.8	1	1													
		11.1.9	1														
		11.1.10	1	1													
		11.1.11	1														
		11.1.12	1	1													
		11.1.13	1														
		11.1.14	1	1													

Typus	Bauart	Art	Funktionsbereich	Maßnahme/Typus der Maßnahme	Maßnahme	Sicht- und/oder Hörsicht-Planung												Sicht- und/oder Hörsicht-Planung	Gitarre					
						Sicht		Sicht		Sicht		Sicht		Sicht		Sicht								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		12.2.11	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.	
		12.2.12	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.13	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.14	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.15	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.16	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.17	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.18	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.19	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.20	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.21	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.
		12.2.22	Regelung der Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum (Tabelle)	Maßnahme: Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum verbessern	1. Hing.	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000	Sicht-Planung	1. Hing.

Nomen	Numer	Genus	Propria et Regulae	Materiae Regulae seu Regulae Propriae (et Regulae Verbales)	Nomen	Septem Regulae Propriae												Materiae Regulae seu Regulae Verbales	Nomen
						I		II		III		IV		V		VI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		12.1.1	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.2	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.3	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.4	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.5	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.6	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.7	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.8	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.9	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.10	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.11	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.12	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.13	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.14	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.15	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.16	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.17	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.18	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.19	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														
		12.1.20	Materiae Regulae sunt in Regula	Materiae Regulae sunt in Regula	I Regula														

No.	Kategori	Kode	Judul Kegiatan	Lokasi Kegiatan (kota/kabupaten/korwil)	Jumlah Sasaran	Target Kegiatan/Kategori Kegiatan												Kategori Kegiatan	Status	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		12.1.1	Program Kerja Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.2	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.3	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.4	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.5	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.6	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.7	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
		12.1.8	Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				
			Program Kerja...	Program Kerja...	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1				

Tahun	Bulan	No	Judul Kegiatan	Materi yang Terdiri dari Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung	No SKB/KB	Materi Pokok Bahasan												Materi Pendukung	Jumlah			
						2007		2008		2009		2010		2011		2012						
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
				Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.1	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.2	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.3	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
				Materi Pendukung (Materi Pendukung) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.4	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.5	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.6	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.7	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.8	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.9	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.10	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.11	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.12	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	
		12.2.13	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	Materi Pokok Bahasan (MPB) tentang... (Judul Kegiatan)	100																	

Tipe	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Materi Pokok Bahasan dan Kegiatan (Konten)	Bentuk	Sifat Kegiatan/Kategori Program												Sifat Kegiatan	Kategori	
						G1		G2		G3		G4		G5		G6				
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		02.2.01	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.02	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.03	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.04	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.05	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.06	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.07	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.08	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.09	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.10	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.11	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.12	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.13	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.14	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.15	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.16	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.17	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.18	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.19	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.2.20	Program Pembelajaran	Keberhasilan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Region	Staat	Land	Region des Landes	Name des Landes (in der Region)	Anzahl der Städte	Anzahl der Städte (in der Region)												Anzahl der Städte (in der Region)	Anzahl der Städte (in der Region)
						100000		200000		300000		400000		500000		600000			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
				Städte mit einer Bevölkerung von über 100000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 200000	1	1		1		1		1		1		1		1	
		11111	Region des Landes	Städte mit einer Bevölkerung von über 300000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 400000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 500000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 600000	1	1		1		1		1		1		1		1	
		11111	Region des Landes	Städte mit einer Bevölkerung von über 700000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 800000	1	1		1		1		1		1		1		1	
		11111	Region des Landes	Städte mit einer Bevölkerung von über 900000	1	1		1		1		1		1		1		1	
				Städte mit einer Bevölkerung von über 1000000	1	1		1		1		1		1		1		1	

Tipe	Kelas	No	Programa de Ensino	Módulo (Curso) ou Unidade (Módulo)	Carga Horária	Segunda-Período												Atividade Avaliativa	Total		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2				
		11.2.1	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.2	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.3	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.4	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.5	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.6	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.7	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.8	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.9	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.10	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.11	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.12	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.13	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.14	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.15	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.16	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.17	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.18	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.19	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.20	Ensino Médio - Matemática - Matemática	Matemática - Matemática - Matemática	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Kategori	Subkategori	Kode	Kategori Kegiatan	Subkategori Kegiatan dan Kegiatan Terkait	Indikator	Tipe Indikator Kinerja												Indikator Kinerja Utama	Sifat
						K1		K2		K3		K4		K5		K6			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
		11.2.1	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.2	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.3	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.3	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.4	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.4	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.5	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.5	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.6	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.6	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.7	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.7	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.8	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.8	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.9	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.9	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.10	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.10	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.11	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.12	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.13	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.13	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.14	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.14	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.15	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.15	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.16	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.16	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.17	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.17	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.18	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.18	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.19	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.19	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.2.20	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi	1.1.20	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Year	Month	Day	Project title	Project description	Project value	Project Budget Breakdown												Total Budget	Total Actual	
						Phase 1				Phase 2				Phase 3						Total
						1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
				Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/11	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/12	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/13	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/14	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/15	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/16	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/17	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/18	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/19	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/20	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/21	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/22	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/23	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/24	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/25	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/26	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/27	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/28	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/29	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		11/30	Project description	Project description	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Title	Status	Year	Program Area/Activity	Address/Event Type/ Service Program (Subtotal) No. of People (Total)	No. of Days	Night Sleep/Daythrough Program												Other Program Area/Activity (Total)	Total
						2001		2002		2003		2004		2005		2006			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
		01.1.01	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.02	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.03	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.04	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.05	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.06	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.07	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.08	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.09	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.10	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.11	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.12	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.13	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.14	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.15	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.16	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.17	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.18	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.19	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.20	Workshop on... (Total: 100)	Workshop on... (Total: 100)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Titel	Baujahr	Jahr	Projektbeschreibung	Werkstoff / Bauweise / Bemerkung (z.B. Material, Ausführung)	Fläche [m²]	Bauhöhe / Bauweise / Bemerkung												Bauhöhe / Bauweise / Bemerkung	Baujahr	
						1. Etage		2. Etage		3. Etage		4. Etage		5. Etage		6. Etage				
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		11.1.1	Wohnung 101 (Wohnfläche: 101 m²)	Wohnung 101 (Wohnfläche: 101 m²)	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.2	Wohnung 102 (Wohnfläche: 102 m²)	Wohnung 102 (Wohnfläche: 102 m²)	102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.3	Wohnung 103 (Wohnfläche: 103 m²)	Wohnung 103 (Wohnfläche: 103 m²)	103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.4	Wohnung 104 (Wohnfläche: 104 m²)	Wohnung 104 (Wohnfläche: 104 m²)	104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.5	Wohnung 105 (Wohnfläche: 105 m²)	Wohnung 105 (Wohnfläche: 105 m²)	105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.6	Wohnung 106 (Wohnfläche: 106 m²)	Wohnung 106 (Wohnfläche: 106 m²)	106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.7	Wohnung 107 (Wohnfläche: 107 m²)	Wohnung 107 (Wohnfläche: 107 m²)	107	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.8	Wohnung 108 (Wohnfläche: 108 m²)	Wohnung 108 (Wohnfläche: 108 m²)	108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.9	Wohnung 109 (Wohnfläche: 109 m²)	Wohnung 109 (Wohnfläche: 109 m²)	109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.10	Wohnung 110 (Wohnfläche: 110 m²)	Wohnung 110 (Wohnfläche: 110 m²)	110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.11	Wohnung 111 (Wohnfläche: 111 m²)	Wohnung 111 (Wohnfläche: 111 m²)	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.12	Wohnung 112 (Wohnfläche: 112 m²)	Wohnung 112 (Wohnfläche: 112 m²)	112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.13	Wohnung 113 (Wohnfläche: 113 m²)	Wohnung 113 (Wohnfläche: 113 m²)	113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.14	Wohnung 114 (Wohnfläche: 114 m²)	Wohnung 114 (Wohnfläche: 114 m²)	114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.15	Wohnung 115 (Wohnfläche: 115 m²)	Wohnung 115 (Wohnfläche: 115 m²)	115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.16	Wohnung 116 (Wohnfläche: 116 m²)	Wohnung 116 (Wohnfläche: 116 m²)	116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.17	Wohnung 117 (Wohnfläche: 117 m²)	Wohnung 117 (Wohnfläche: 117 m²)	117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.18	Wohnung 118 (Wohnfläche: 118 m²)	Wohnung 118 (Wohnfläche: 118 m²)	118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.19	Wohnung 119 (Wohnfläche: 119 m²)	Wohnung 119 (Wohnfläche: 119 m²)	119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.20	Wohnung 120 (Wohnfläche: 120 m²)	Wohnung 120 (Wohnfläche: 120 m²)	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Region	Sector	Code	Programme/Project	Address/Event Type/ Service Program (subsector) No. Regions (Africa)	No. Staff 2010	High Level Budgetary Provisions												2010 Budget Actual Spending 2010	2010
						2010		2011		2012		2013		2014		2015			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000		
				Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000		
				Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000		
		11.2.10	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.11	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.12	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.13	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.14	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.15	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.16	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.17	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.18	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.19	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		11.2.20	Regional Development Programme	Regional Development Programme	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000

Tipe	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Materi Pokok (Topik, Subtopik, Program, Subprogram) dan Kegiatan (Subtopik)	Materi Pokok	Sifat Kegiatan/Program												Materi Pokok/ Subtopik/ Kegiatan	Kelas
						D1		D2		D3		D4		D5		D6			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
				Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.1	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.2	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.3	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.4	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.5	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.6	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.7	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.8	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.9	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.10	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.11	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.12	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.13	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.14	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		11.1.15	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	Kejuruteraan Program Kerja (Materi Pokok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2021	2021	2023	2024	
1	Meningkatnya Sasaran transportasi yang berkelolaan								
	Menurun nya angka kemacetan	kemacetan	213	209	205	200	196	193	193

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2021	2021	2023	2024	
1	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Ratio)	VC	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,88	0,88

2	Proporsi Jumlah Sampelan Lebih Tinggi per Tahun Jumlah Sampelan (Mg/L)	Persen	82,77	82,29	81,05	81,34	81,44	81,67	81,67
3	Meningkatnya pelaksanaan pertambangan yang ramah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 tahun 2019 – 2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Perubahan Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

Sumber, September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581121 199603 1 002

LAMPIRAN

1. **Cascading Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024**